



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 116/PMK.07/2021

TENTANG

PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
2. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah.

BAB II

PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

Pasal 2

- (1) Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk:
 - a. pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah;
 - b. penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika dipersyaratkan; dan/atau
 - c. penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Peta Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi; dan
 - b. Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota.
- (3) Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dan Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYUSUNAN PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. tahap I, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi; dan
 - b. tahap II, penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah provinsi.
- (2) Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. tahap I, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota; dan
 - b. tahap II, penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a didasarkan pada formula sebagai berikut:

$$KFD_{provinsi-i} = \text{pendapatan} - [\text{pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{belanja tertentu}]$$

Keterangan:

$KFD_{provinsi-i}$ = Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi

- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
- (3) Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pajak Rokok;
 - b. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - c. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi;
 - d. Dana Alokasi Khusus Fisik;
 - e. Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
 - f. Dana Otonomi Khusus;
 - g. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus;
 - h. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - i. Hibah.
- (4) Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tidak termasuk Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (5) Belanja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Bunga; dan
 - c. Belanja Bagi Hasil.

Pasal 5

- (1) Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b didasarkan pada formula sebagai berikut:

$$IKFD_{provinsi-i} = \frac{KFD_{provinsi-i}}{(\sum KFD_{provinsi})/n}$$

Keterangan:

$IKFD_{provinsi-i}$ = Indeks Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi

$KFD_{provinsi-i}$ = Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi

$\sum KFD_{provinsi}$ = Total Kapasitas Fiskal Daerah provinsi

n = 34 (tiga puluh empat) daerah provinsi

- (2) Berdasarkan indeks Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah provinsi dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

Rentang IKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
$IKFD < 0,275$	sangat rendah
$0,275 \leq IKFD < 0,458$	rendah
$0,458 \leq IKFD < 0,863$	sedang
$0,863 \leq IKFD < 1,745$	tinggi
$IKFD \geq 1,745$	sangat tinggi

Pasal 6

- (1) Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a didasarkan pada formula sebagai berikut:

$KFD_{kabupaten/kota-i}$ = pendapatan - [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu]

Keterangan:

$KFD_{kabupaten/kota-i}$ = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota

- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Pendapatan Asli Daerah;
 - Pendapatan Transfer; dan
 - Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
- (3) Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - Dana Alokasi Khusus Fisik;

- c. Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
 - d. Dana Otonomi Khusus;
 - e. Dana Desa; dan
 - f. Hibah.
- (4) Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak termasuk Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (5) Belanja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Bunga;
 - c. Belanja Bagi Hasil; dan
 - d. Alokasi Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b didasarkan pada formula sebagai berikut:

$$IKFD_{kabupaten/kota-i} = \frac{KFD_{kabupaten/kota-i}}{(\sum KFD_{kabupaten/kota})/n}$$

Keterangan:

$IKFD_{kabupaten/kota-i}$ = Indeks Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota

$KFD_{kabupaten/kota-i}$ = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota

$\sum KFD_{kabupaten/kota}$ = Total Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota

n = 508 (lima ratus delapan) daerah kabupaten/kota

- (2) Berdasarkan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

Rentang IKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
$IKFD < 0,530$	sangat rendah
$0,530 \leq IKFD < 0,727$	rendah
$0,727 \leq IKFD < 1,053$	sedang
$1,053 \leq IKFD < 1,838$	tinggi
$IKFD \geq 1,838$	sangat tinggi

Pasal 8

Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 menggunakan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 977), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

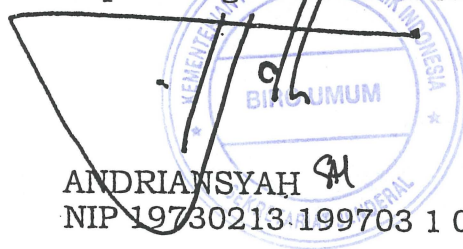
BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 991

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian


ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 116/PMK.07/2021
TENTANG
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

A. PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH PROVINSI

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
1	Prov. Aceh	0,303	Rendah
2	Prov. Sumatera Utara	0,893	Tinggi
3	Prov. Sumatera Barat	0,461	Sedang
4	Prov. Riau	0,887	Tinggi
5	Prov. Jambi	0,249	Sangat Rendah
6	Prov. Sumatera Selatan	0,958	Tinggi
7	Prov. Bengkulu	0,193	Sangat Rendah
8	Prov. Lampung	0,526	Sedang
9	Prov. DKI Jakarta	11,391	Sangat Tinggi
10	Prov. Jawa Barat	3,602	Sangat Tinggi
11	Prov. Jawa Tengah	2,046	Sangat Tinggi
12	Prov. DI Yogyakarta	0,269	Sangat Rendah
13	Prov. Jawa Timur	2,541	Sangat Tinggi
14	Prov. Kalimantan Barat	0,508	Sedang
15	Prov. Kalimantan Tengah	0,392	Rendah
16	Prov. Kalimantan Selatan	0,708	Sedang
17	Prov. Kalimantan Timur	0,975	Tinggi
18	Prov. Sulawesi Utara	0,336	Rendah
19	Prov. Sulawesi Tengah	0,278	Rendah
20	Prov. Sulawesi Selatan	0,790	Sedang
21	Prov. Sulawesi Tenggara	0,233	Sangat Rendah
22	Prov. Bali	0,461	Sedang
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	0,408	Rendah
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	0,454	Rendah
25	Prov. Maluku	0,218	Sangat Rendah
26	Prov. Papua	0,667	Sedang
27	Prov. Maluku Utara	0,274	Sangat Rendah
28	Prov. Banten	1,133	Tinggi
29	Prov. Bangka Belitung	0,196	Sangat Rendah

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
30	Prov. Gorontalo	0,160	Sangat Rendah
31	Prov. Kepulauan Riau	0,368	Rendah
32	Prov. Papua Barat	0,651	Sedang
33	Prov. Sulawesi Barat	0,179	Sangat Rendah
34	Prov. Kalimantan Utara	0,294	Rendah

B. PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH KABUPATEN/KOTA

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
1	Kab. Aceh Barat	0,465	Sangat Rendah
2	Kab. Aceh Besar	0,986	Sedang
3	Kab. Aceh Selatan	0,726	Rendah
4	Kab. Aceh Singkil	0,411	Sangat Rendah
5	Kab. Aceh Tengah	0,690	Rendah
6	Kab. Aceh Tenggara	0,546	Rendah
7	Kab. Aceh Timur	0,836	Sedang
8	Kab. Aceh Utara	1,015	Sedang
9	Kab. Bireuen	0,928	Sedang
10	Kab. Pidie	0,900	Sedang
11	Kab. Simeulue	0,481	Sangat Rendah
12	Kota Banda Aceh	1,156	Tinggi
13	Kota Sabang	0,431	Sangat Rendah
14	Kota Langsa	0,589	Rendah
15	Kota Lhokseumawe	0,594	Rendah
16	Kab. Gayo Lues	0,670	Rendah
17	Kab. Aceh Barat Daya	0,448	Sangat Rendah
18	Kab. Aceh Jaya	0,416	Sangat Rendah
19	Kab. Nagan Raya	0,734	Sedang
20	Kab. Aceh Tamiang	0,652	Rendah
21	Kab. Bener Meriah	0,507	Sangat Rendah
22	Kab. Pidie Jaya	0,657	Rendah
23	Kota Subulussalam	0,565	Rendah
24	Kab. Asahan	1,024	Sedang
25	Kab. Dairi	0,529	Sangat Rendah
26	Kab. Deli Serdang	3,162	Sangat Tinggi
27	Kab. Karo	0,512	Sangat Rendah
28	Kab. Labuhanbatu	0,778	Sedang
29	Kab. Langkat	1,398	Tinggi
30	Kab. Mandailing Natal	0,679	Rendah
31	Kab. Nias	0,401	Sangat Rendah
32	Kab. Simalungun	1,084	Tinggi
33	Kab. Tapanuli Selatan	0,858	Sedang
34	Kab. Tapanuli Tengah	0,594	Rendah
35	Kab. Tapanuli Utara	0,606	Rendah

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
36	Kab. Toba	0,499	Sangat Rendah
37	Kota Binjai	0,728	Sedang
38	Kota Medan	4,691	Sangat Tinggi
39	Kota Pematang Siantar	0,704	Rendah
40	Kota Sibolga	0,473	Sangat Rendah
41	Kota Tanjung Balai	0,397	Sangat Rendah
42	Kota Tebing Tinggi	0,588	Rendah
43	Kota Padang Sidempuan	0,460	Sangat Rendah
44	Kab. Pakpak Bharat	0,254	Sangat Rendah
45	Kab. Nias Selatan	0,516	Sangat Rendah
46	Kab. Humbang Hasundutan	0,453	Sangat Rendah
47	Kab. Serdang Bedagai	0,927	Sedang
48	Kab. Samosir	0,545	Rendah
49	Kab. Batu Bara	0,688	Rendah
50	Kab. Padang Lawas	0,606	Rendah
51	Kab. Padang Lawas Utara	0,437	Sangat Rendah
52	Kab. Labuhanbatu Selatan	0,617	Rendah
53	Kab. Labuhanbatu Utara	0,543	Rendah
54	Kab. Nias Utara	0,462	Sangat Rendah
55	Kab. Nias Barat	0,336	Sangat Rendah
56	Kota Gunungsitoli	0,383	Sangat Rendah
57	Kab. Limapuluh Kota	0,575	Rendah
58	Kab. Agam	0,616	Rendah
59	Kab. Kepulauan Mentawai	0,628	Rendah
60	Kab. Padang Pariaman	0,506	Sangat Rendah
61	Kab. Pasaman	0,454	Sangat Rendah
62	Kab. Pesisir Selatan	0,692	Rendah
63	Kab. Sijunjung	0,421	Sangat Rendah
64	Kab. Solok	0,542	Rendah
65	Kab. Tanah Datar	0,591	Rendah
66	Kota Bukittinggi	0,629	Rendah
67	Kota Padang Panjang	0,415	Sangat Rendah
68	Kota Padang	2,078	Sangat Tinggi
69	Kota Payakumbuh	0,537	Rendah
70	Kota Sawahlunto	0,406	Sangat Rendah
71	Kota Solok	0,374	Sangat Rendah

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
72	Kota Pariaman	0,415	Sangat Rendah
73	Kab. Pasaman Barat	0,590	Rendah
74	Kab. Dharmasraya	0,397	Sangat Rendah
75	Kab. Solok Selatan	0,466	Sangat Rendah
76	Kab. Bengkalis	3,487	Sangat Tinggi
77	Kab. Indragiri Hilir	0,993	Sedang
78	Kab. Indragiri Hulu	0,879	Sedang
79	Kab. Kampar	1,238	Tinggi
80	Kab. Kuantan Singingi	0,626	Rendah
81	Kab. Pelalawan	1,154	Tinggi
82	Kab. Rokan Hilir	1,110	Tinggi
83	Kab. Rokan Hulu	0,924	Sedang
84	Kab. Siak	1,407	Tinggi
85	Kota Dumai	0,933	Sedang
86	Kota Pekanbaru	2,518	Sangat Tinggi
87	Kab. Kepulauan Meranti	0,812	Sedang
88	Kab. Batanghari	0,854	Sedang
89	Kab. Bungo	0,704	Rendah
90	Kab. Kerinci	0,547	Rendah
91	Kab. Merangin	0,560	Rendah
92	Kab. Muaro Jambi	0,834	Sedang
93	Kab. Sarolangun	0,680	Rendah
94	Kab. Tanjung Jabung Barat	0,885	Sedang
95	Kab. Tanjung Jabung Timur	0,667	Rendah
96	Kab. Tebo	0,616	Rendah
97	Kota Jambi	1,370	Tinggi
98	Kota Sungai Penuh	0,443	Sangat Rendah
99	Kab. Lahat	1,224	Tinggi
100	Kab. Musi Banyuasin	2,451	Sangat Tinggi
101	Kab. Musi Rawas	1,313	Tinggi
102	Kab. Muara Enim	2,079	Sangat Tinggi
103	Kab. Ogan Komering Ilir	1,022	Sedang
104	Kab. Ogan Komering Ulu	0,988	Sedang
105	Kota Palembang	3,518	Sangat Tinggi
106	Kota Prabumulih	0,629	Rendah
107	Kota Pagar Alam	0,485	Sangat Rendah

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
108	Kota Lubuk Linggau	0,713	Rendah
109	Kab. Banyuasin	1,441	Tinggi
110	Kab. Ogan Ilir	0,728	Sedang
111	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	0,865	Sedang
112	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	0,740	Sedang
113	Kab. Empat Lawang	0,593	Rendah
114	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1,288	Tinggi
115	Kab. Musi Rawas Utara	0,713	Rendah
116	Kab. Bengkulu Selatan	0,360	Sangat Rendah
117	Kab. Bengkulu Utara	0,562	Rendah
118	Kab. Rejang Lebong	0,491	Sangat Rendah
119	Kota Bengkulu	0,841	Sedang
120	Kab. Kaur	0,444	Sangat Rendah
121	Kab. Seluma	0,354	Sangat Rendah
122	Kab. Mukomuko	0,511	Sangat Rendah
123	Kab. Lebong	0,425	Sangat Rendah
124	Kab. Kepahiang	0,437	Sangat Rendah
125	Kab. Bengkulu Tengah	0,389	Sangat Rendah
126	Kab. Lampung Barat	0,531	Rendah
127	Kab. Lampung Selatan	1,040	Sedang
128	Kab. Lampung Tengah	1,239	Tinggi
129	Kab. Lampung Utara	0,806	Sedang
130	Kab. Lampung Timur	1,262	Tinggi
131	Kab. Tanggamus	1,068	Tinggi
132	Kab. Tulang Bawang	0,704	Rendah
133	Kab. Way Kanan	0,648	Rendah
134	Kota Bandar Lampung	2,713	Sangat Tinggi
135	Kota Metro	0,677	Rendah
136	Kab. Pesawaran	0,636	Rendah
137	Kab. Pringsewu	0,612	Rendah
138	Kab. Mesuji	0,438	Sangat Rendah
139	Kab. Tulang Bawang Barat	0,567	Rendah
140	Kab. Pesisir Barat	0,633	Rendah
141	Kab. Bandung	3,729	Sangat Tinggi
142	Kab. Bekasi	4,888	Sangat Tinggi
143	Kab. Bogor	6,209	Sangat Tinggi

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
144	Kab. Ciamis	1,289	Tinggi
145	Kab. Cianjur	2,660	Sangat Tinggi
146	Kab. Cirebon	1,593	Tinggi
147	Kab. Garut	2,510	Sangat Tinggi
148	Kab. Indramayu	2,160	Sangat Tinggi
149	Kab. Karawang	3,176	Sangat Tinggi
150	Kab. Kuningan	1,229	Tinggi
151	Kab. Majalengka	2,348	Sangat Tinggi
152	Kab. Purwakarta	1,335	Tinggi
153	Kab. Subang	1,689	Tinggi
154	Kab. Sukabumi	2,652	Sangat Tinggi
155	Kab. Sumedang	1,631	Tinggi
156	Kab. Tasikmalaya	1,535	Tinggi
157	Kota Bandung	6,371	Sangat Tinggi
158	Kota Bekasi	6,448	Sangat Tinggi
159	Kota Bogor	1,808	Tinggi
160	Kota Cirebon	1,188	Tinggi
161	Kota Depok	3,400	Sangat Tinggi
162	Kota Sukabumi	0,979	Sedang
163	Kota Tasikmalaya	1,190	Tinggi
164	Kota Cimahi	0,791	Sedang
165	Kota Banjar	0,459	Sangat Rendah
166	Kab. Bandung Barat	1,498	Tinggi
167	Kab. Pangandaran	1,127	Tinggi
168	Kab. Banjarnegara	1,170	Tinggi
169	Kab. Banyumas	1,693	Tinggi
170	Kab. Batang	0,963	Sedang
171	Kab. Blora	1,163	Tinggi
172	Kab. Boyolali	1,234	Tinggi
173	Kab. Brebes	1,857	Sangat Tinggi
174	Kab. Cilacap	2,206	Sangat Tinggi
175	Kab. Demak	1,428	Tinggi
176	Kab. Grobogan	1,494	Tinggi
177	Kab. Jepara	1,376	Tinggi
178	Kab. Karanganyar	0,968	Sedang
179	Kab. Kebumen	1,478	Tinggi

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
180	Kab. Kendal	0,919	Sedang
181	Kab. Klaten	1,026	Sedang
182	Kab. Kudus	1,036	Sedang
183	Kab. Magelang	1,303	Tinggi
184	Kab. Pati	1,468	Tinggi
185	Kab. Pekalongan	1,256	Tinggi
186	Kab. Pemalang	1,217	Tinggi
187	Kab. Purbalingga	0,973	Sedang
188	Kab. Purworejo	1,179	Tinggi
189	Kab. Rembang	0,816	Sedang
190	Kab. Semarang	1,781	Tinggi
191	Kab. Sragen	0,684	Rendah
192	Kab. Sukoharjo	1,178	Tinggi
193	Kab. Tegal	1,506	Tinggi
194	Kab. Temanggung	1,023	Sedang
195	Kab. Wonogiri	0,924	Sedang
196	Kab. Wonosobo	1,020	Sedang
197	Kota Magelang	0,779	Sedang
198	Kota Pekalongan	0,714	Rendah
199	Kota Salatiga	0,850	Sedang
200	Kota Semarang	5,806	Sangat Tinggi
201	Kota Surakarta	1,845	Sangat Tinggi
202	Kota Tegal	0,980	Sedang
203	Kab. Bantul	1,487	Tinggi
204	Kab. Gunung Kidul	0,934	Sedang
205	Kab. Kulonprogo	0,913	Sedang
206	Kab. Sleman	1,954	Sangat Tinggi
207	Kota Yogyakarta	1,529	Tinggi
208	Kab. Bangkalan	1,100	Tinggi
209	Kab. Banyuwangi	1,905	Sangat Tinggi
210	Kab. Blitar	1,414	Tinggi
211	Kab. Bojonegoro	3,869	Sangat Tinggi
212	Kab. Bondowoso	0,912	Sedang
213	Kab. Gresik	2,869	Sangat Tinggi
214	Kab. Jember	2,200	Sangat Tinggi
215	Kab. Jombang	1,434	Tinggi

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
216	Kab. Kediri	1,251	Tinggi
217	Kab. Lamongan	2,008	Sangat Tinggi
218	Kab. Lumajang	1,341	Tinggi
219	Kab. Madiun	0,976	Sedang
220	Kab. Magetan	0,835	Sedang
221	Kab. Malang	2,369	Sangat Tinggi
222	Kab. Mojokerto	1,430	Tinggi
223	Kab. Nganjuk	1,187	Tinggi
224	Kab. Ngawi	0,891	Sedang
225	Kab. Pacitan	0,921	Sedang
226	Kab. Pamekasan	0,841	Sedang
227	Kab. Pasuruan	2,094	Sangat Tinggi
228	Kab. Ponorogo	1,129	Tinggi
229	Kab. Probolinggo	1,093	Tinggi
230	Kab. Sampang	0,895	Sedang
231	Kab. Sidoarjo	3,296	Sangat Tinggi
232	Kab. Situbondo	0,937	Sedang
233	Kab. Sumenep	0,965	Sedang
234	Kab. Trenggalek	0,943	Sedang
235	Kab. Tuban	1,431	Tinggi
236	Kab. Tulungagung	1,075	Tinggi
237	Kota Blitar	0,855	Sedang
238	Kota Kediri	0,914	Sedang
239	Kota Madiun	0,847	Sedang
240	Kota Malang	1,984	Sangat Tinggi
241	Kota Mojokerto	0,794	Sedang
242	Kota Pasuruan	0,550	Rendah
243	Kota Probolinggo	0,771	Sedang
244	Kota Surabaya	10,082	Sangat Tinggi
245	Kota Batu	0,789	Sedang
246	Kab. Bengkayang	0,500	Sangat Rendah
247	Kab. Landak	0,780	Sedang
248	Kab. Kapuas Hulu	0,949	Sedang
249	Kab. Ketapang	1,401	Tinggi
250	Kab. Mempawah	0,571	Rendah
251	Kab. Sambas	0,785	Sedang

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
252	Kab. Sanggau	0,897	Sedang
253	Kab. Sintang	0,919	Sedang
254	Kota Pontianak	1,444	Tinggi
255	Kota Singkawang	0,614	Rendah
256	Kab. Sekadau	0,552	Rendah
257	Kab. Melawi	0,561	Rendah
258	Kab. Kayong Utara	0,512	Sangat Rendah
259	Kab. Kubu Raya	0,796	Sedang
260	Kab. Barito Selatan	0,496	Sangat Rendah
261	Kab. Barito Utara	0,484	Sangat Rendah
262	Kab. Kapuas	0,967	Sedang
263	Kab. Kotawaringin Barat	0,846	Sedang
264	Kab. Kotawaringin Timur	1,306	Tinggi
265	Kota Palangka Raya	0,752	Sedang
266	Kab. Katingan	0,717	Rendah
267	Kab. Seruyan	0,907	Sedang
268	Kab. Sukamara	0,489	Sangat Rendah
269	Kab. Lamandau	0,497	Sangat Rendah
270	Kab. Gunung Mas	0,646	Rendah
271	Kab. Pulang Pisau	0,545	Rendah
272	Kab. Murung Raya	0,764	Sedang
273	Kab. Barito Timur	0,710	Rendah
274	Kab. Banjar	0,742	Sedang
275	Kab. Barito Kuala	0,599	Rendah
276	Kab. Hulu Sungai Selatan	0,822	Sedang
277	Kab. Hulu Sungai Tengah	0,495	Sangat Rendah
278	Kab. Hulu Sungai Utara	0,619	Rendah
279	Kab. Kotabaru	0,891	Sedang
280	Kab. Tabalong	1,042	Sedang
281	Kab. Tanah Laut	0,836	Sedang
282	Kab. Tapin	0,718	Rendah
283	Kota Banjarbaru	0,895	Sedang
284	Kota Banjarmasin	1,057	Tinggi
285	Kab. Balangan	0,758	Sedang
286	Kab. Tanah Bumbu	1,297	Tinggi
287	Kab. Berau	1,657	Tinggi

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
288	Kab. Kutai Kartanegara	2,738	Sangat Tinggi
289	Kab. Kutai Barat	1,650	Tinggi
290	Kab. Kutai Timur	2,605	Sangat Tinggi
291	Kab. Paser	1,021	Sedang
292	Kota Balikpapan	2,247	Sangat Tinggi
293	Kota Bontang	0,876	Sedang
294	Kota Samarinda	1,972	Sangat Tinggi
295	Kab. Penajam Paser Utara	0,754	Sedang
296	Kab. Mahakam Ulu	0,953	Sedang
297	Kab. Bolaang Mongondow	0,538	Rendah
298	Kab. Minahasa	0,556	Rendah
299	Kab. Kepulauan Sangihe	0,379	Sangat Rendah
300	Kota Bitung	0,681	Rendah
301	Kota Manado	1,207	Tinggi
302	Kab. Kepulauan Talaud	0,319	Sangat Rendah
303	Kab. Minahasa Selatan	0,371	Sangat Rendah
304	Kota Tomohon	0,544	Rendah
305	Kab. Minahasa Utara	0,622	Rendah
306	Kota Kotamobagu	0,434	Sangat Rendah
307	Kab. Minahasa Tenggara	0,448	Sangat Rendah
308	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0,386	Sangat Rendah
309	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	0,331	Sangat Rendah
310	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0,306	Sangat Rendah
311	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0,333	Sangat Rendah
312	Kab. Banggai	1,147	Tinggi
313	Kab. Banggai Kepulauan	0,326	Sangat Rendah
314	Kab. Buol	0,453	Sangat Rendah
315	Kab. Toli-Toli	0,586	Rendah
316	Kab. Donggala	0,530	Rendah
317	Kab. Morowali	1,093	Tinggi
318	Kab. Poso	0,636	Rendah
319	Kota Palu	0,941	Sedang
320	Kab. Parigi Moutong	0,544	Rendah
321	Kab. Tojo Una-una	0,539	Rendah
322	Kab. Sigi	0,479	Sangat Rendah

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
323	Kab. Banggai Laut	0,440	Sangat Rendah
324	Kab. Morowali Utara	0,629	Rendah
325	Kab. Bantaeng	0,747	Sedang
326	Kab. Barru	0,561	Rendah
327	Kab. Bone	1,101	Tinggi
328	Kab. Bulukumba	0,761	Sedang
329	Kab. Enrekang	0,518	Sangat Rendah
330	Kab. Gowa	0,994	Sedang
331	Kab. Jeneponto	0,677	Rendah
332	Kab. Luwu	0,651	Rendah
333	Kab. Luwu Utara	0,768	Sedang
334	Kab. Maros	1,005	Sedang
335	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	0,870	Sedang
336	Kab. Pinrang	0,679	Rendah
337	Kab. Kepulauan Selayar	0,678	Rendah
338	Kab. Sidenreng Rappang	0,634	Rendah
339	Kab. Sinjai	0,538	Rendah
340	Kab. Soppeng	0,502	Sangat Rendah
341	Kab. Takalar	0,544	Rendah
342	Kab. Tana Toraja	0,585	Rendah
343	Kab. Wajo	0,751	Sedang
344	Kota Parepare	0,896	Sedang
345	Kota Makassar	4,039	Sangat Tinggi
346	Kota Palopo	0,651	Rendah
347	Kab. Luwu Timur	1,023	Sedang
348	Kab. Toraja Utara	0,650	Rendah
349	Kab. Buton	0,442	Sangat Rendah
350	Kab. Konawe	0,659	Rendah
351	Kab. Kolaka	0,850	Sedang
352	Kab. Muna	0,749	Sedang
353	Kota Kendari	1,177	Tinggi
354	Kota Bau-Bau	0,551	Rendah
355	Kab. Konawe Selatan	0,603	Rendah
356	Kab. Bombana	0,641	Rendah
357	Kab. Wakatobi	0,454	Sangat Rendah
358	Kab. Kolaka Utara	0,469	Sangat Rendah

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
359	Kab. Konawe Utara	0,637	Rendah
360	Kab. Buton Utara	0,362	Sangat Rendah
361	Kab. Kolaka Timur	0,490	Sangat Rendah
362	Kab. Konawe Kepulauan	0,410	Sangat Rendah
363	Kab. Muna Barat	0,368	Sangat Rendah
364	Kab. Buton Tengah	0,355	Sangat Rendah
365	Kab. Buton Selatan	0,399	Sangat Rendah
366	Kab. Badung	2,973	Sangat Tinggi
367	Kab. Bangli	0,491	Sangat Rendah
368	Kab. Buleleng	1,426	Tinggi
369	Kab. Gianyar	1,774	Tinggi
370	Kab. Jembrana	0,682	Rendah
371	Kab. Karangasem	0,925	Sedang
372	Kab. Klungkung	0,683	Rendah
373	Kab. Tabanan	1,023	Sedang
374	Kota Denpasar	1,271	Tinggi
375	Kab. Bima	0,676	Rendah
376	Kab. Dompu	0,592	Rendah
377	Kab. Lombok Barat	0,887	Sedang
378	Kab. Lombok Tengah	0,898	Sedang
379	Kab. Lombok Timur	1,344	Tinggi
380	Kab. Sumbawa	0,770	Sedang
381	Kota Mataram	1,150	Tinggi
382	Kota Bima	0,523	Sangat Rendah
383	Kab. Sumbawa Barat	0,574	Rendah
384	Kab. Lombok Utara	0,515	Sangat Rendah
385	Kab. Alor	0,523	Sangat Rendah
386	Kab. Belu	0,491	Sangat Rendah
387	Kab. Ende	0,446	Sangat Rendah
388	Kab. Flores Timur	0,462	Sangat Rendah
389	Kab. Kupang	0,517	Sangat Rendah
390	Kab. Lembata	0,401	Sangat Rendah
391	Kab. Manggarai	0,546	Rendah
392	Kab. Ngada	0,455	Sangat Rendah
393	Kab. Sikka	0,498	Sangat Rendah
394	Kab. Sumba Barat	0,453	Sangat Rendah

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
395	Kab. Sumba Timur	0,643	Rendah
396	Kab. Timor Tengah Selatan	0,600	Rendah
397	Kab. Timor Tengah Utara	0,448	Sangat Rendah
398	Kota Kupang	0,778	Sedang
399	Kab. Rote Ndao	0,368	Sangat Rendah
400	Kab. Manggarai Barat	0,797	Sedang
401	Kab. Nagekeo	0,318	Sangat Rendah
402	Kab. Sumba Tengah	0,360	Sangat Rendah
403	Kab. Sumba Barat Daya	0,513	Sangat Rendah
404	Kab. Manggarai Timur	0,455	Sangat Rendah
405	Kab. Sabu Raijua	0,444	Sangat Rendah
406	Kab. Malaka	0,344	Sangat Rendah
407	Kab. Kepulauan Tanimbar	0,360	Sangat Rendah
408	Kab. Maluku Tengah	0,750	Sedang
409	Kab. Maluku Tenggara	0,486	Sangat Rendah
410	Kab. Buru	0,400	Sangat Rendah
411	Kota Ambon	0,857	Sedang
412	Kab. Seram Bagian Barat	0,477	Sangat Rendah
413	Kab. Seram Bagian Timur	0,461	Sangat Rendah
414	Kab. Kepulauan Aru	0,717	Rendah
415	Kota Tual	0,402	Sangat Rendah
416	Kab. Maluku Barat Daya	0,703	Rendah
417	Kab. Buru Selatan	0,458	Sangat Rendah
418	Kab. Biak Numfor	0,616	Rendah
419	Kab. Jayapura	0,801	Sedang
420	Kab. Jayawijaya	0,693	Rendah
421	Kab. Merauke	1,155	Tinggi
422	Kab. Mimika	3,679	Sangat Tinggi
423	Kab. Nabire	0,638	Rendah
424	Kab. Paniai	0,508	Sangat Rendah
425	Kab. Puncak Jaya	0,535	Rendah
426	Kab. Kepulauan Yapen	0,497	Sangat Rendah
427	Kota Jayapura	0,777	Sedang
428	Kab. Sarmi	0,783	Sedang
429	Kab. Keerom	0,486	Sangat Rendah
430	Kab. Yahukimo	0,686	Rendah

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
431	Kab. Pegunungan Bintang	0,759	Sedang
432	Kab. Tolikara	0,796	Sedang
433	Kab. Boven Digoel	0,986	Sedang
434	Kab. Mappi	0,873	Sedang
435	Kab. Asmat	1,052	Sedang
436	Kab. Waropen	0,485	Sangat Rendah
437	Kab. Supiori	0,376	Sangat Rendah
438	Kab. Mamberamo Raya	0,803	Sedang
439	Kab. Mamberamo Tengah	0,633	Rendah
440	Kab. Yalimo	0,786	Sedang
441	Kab. Lanny Jaya	0,728	Sedang
442	Kab. Nduga	0,804	Sedang
443	Kab. Puncak	0,885	Sedang
444	Kab. Dogiyai	0,401	Sangat Rendah
445	Kab. Intan Jaya	0,705	Rendah
446	Kab. Deiyai	0,448	Sangat Rendah
447	Kab. Halmahera Tengah	0,800	Sedang
448	Kota Ternate	0,756	Sedang
449	Kab. Halmahera Barat	0,414	Sangat Rendah
450	Kab. Halmahera Timur	0,632	Rendah
451	Kab. Halmahera Selatan	1,016	Sedang
452	Kab. Halmahera Utara	0,688	Rendah
453	Kab. Kepulauan Sula	0,484	Sangat Rendah
454	Kota Tidore Kepulauan	0,480	Sangat Rendah
455	Kab. Pulau Morotai	0,371	Sangat Rendah
456	Kab. Pulau Taliabu	0,449	Sangat Rendah
457	Kab. Lebak	1,494	Tinggi
458	Kab. Pandeglang	1,073	Tinggi
459	Kab. Serang	1,742	Tinggi
460	Kab. Tangerang	4,811	Sangat Tinggi
461	Kota Cilegon	1,529	Tinggi
462	Kota Tangerang	4,487	Sangat Tinggi
463	Kota Serang	1,143	Tinggi
464	Kota Tangerang Selatan	3,667	Sangat Tinggi
465	Kab. Bangka	0,601	Rendah
466	Kab. Belitung	0,485	Sangat Rendah

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
467	Kota Pangkal Pinang	0,651	Rendah
468	Kab. Bangka Selatan	0,471	Sangat Rendah
469	Kab. Bangka Tengah	0,599	Rendah
470	Kab. Bangka Barat	0,578	Rendah
471	Kab. Belitung Timur	0,537	Rendah
472	Kab. Boalemo	0,353	Sangat Rendah
473	Kab. Gorontalo	0,696	Rendah
474	Kota Gorontalo	0,821	Sedang
475	Kab. Pohuwato	0,538	Rendah
476	Kab. Bone Bolango	0,546	Rendah
477	Kab. Gorontalo Utara	0,397	Sangat Rendah
478	Kab. Karimun	0,919	Sedang
479	Kab. Bintan	0,685	Rendah
480	Kab. Natuna	0,587	Rendah
481	Kota Batam	2,783	Sangat Tinggi
482	Kota Tanjung Pinang	0,611	Rendah
483	Kab. Lingga	0,559	Rendah
484	Kab. Kepulauan Anambas	0,444	Sangat Rendah
485	Kab. Fakfak	0,591	Rendah
486	Kab. Manokwari	0,471	Sangat Rendah
487	Kab. Sorong	0,505	Sangat Rendah
488	Kota Sorong	0,831	Sedang
489	Kab. Raja Ampat	0,815	Sedang
490	Kab. Sorong Selatan	0,616	Rendah
491	Kab. Teluk Bintuni	2,070	Sangat Tinggi
492	Kab. Teluk Wondama	0,433	Sangat Rendah
493	Kab. Kaimana	0,662	Rendah
494	Kab. Tambrau	0,731	Sedang
495	Kab. Maybrat	0,243	Sangat Rendah
496	Kab. Manokwari Selatan	0,334	Sangat Rendah
497	Kab. Pegunungan Arfak	0,308	Sangat Rendah
498	Kab. Majene	0,436	Sangat Rendah
499	Kab. Mamuju	0,693	Rendah
500	Kab. Polewali Mandar	0,753	Sedang
501	Kab. Mamasa	0,361	Sangat Rendah
502	Kab. Pasangkayu	0,474	Sangat Rendah

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
503	Kab. Mamuju Tengah	0,411	Sangat Rendah
504	Kab. Bulungan	0,715	Rendah
505	Kab. Malinau	0,924	Sedang
506	Kab. Nunukan	0,721	Rendah
507	Kota Tarakan	0,733	Sedang
508	Kab. Tana Tidung	0,605	Rendah

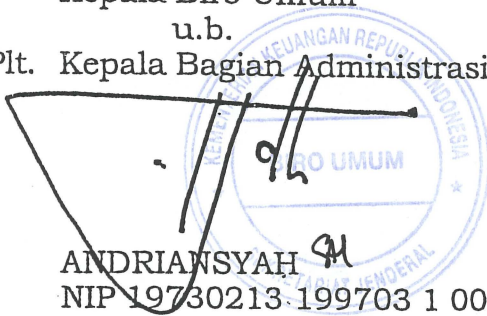
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

A large handwritten signature in black ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA' and 'BIRO UMUM'. The signature appears to be 'ANDRIANSYAH' with a stylized initial 'A'.

ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001